

Intisari

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki dasar negara Pancasila dan tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Tujuan bernegara tersebut menjadi tugas dari semua struktur pemerintahan termasuk pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah. Sesuai dengan semangat otonomi daerah dan amanat undang-undang maka pemilihan kepala daerah dilakukan melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. Bupati/walikota memiliki periode jabatan maksimal dua periode kepemimpinan dalam membuat berbagai kebijakan publik dan membawa pemerintah daerah ke arah pembangunan yang dikehendaki. Belanja modal pemerintah adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pada proyek-proyek tertentu dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan kenyamanan warganya untuk jangka waktu yang panjang.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh periode jabatan kepala daerah dan berbagai faktor pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) terhadap alokasi belanja modal pada 35 pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2016. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah oleh BPK RI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun secara simultan, semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Namun demikian, variabel periode jabatan kepala daerah menunjukkan arah yang berlawanan dibandingkan variabel-variabel lainnya.

Kata Kunci: Pemilihan kepala daerah, PAD, Dana Perimbangan, SILPA, Belanja Modal, Regresi Data Panel.

Abstract

Regional head elections are carried out through direct regional head elections where regents/mayors have a maximum leadership period of two periods. Policies of the government heads are very crucial including the allocation of capital expenditures which are expenditures incurred by the government on certain projects in order to improve the standard of living of the people and create the comfort of its citizens for a long period of time.

This study aims to examine and obtain empirical evidence about the influence of the term of office of the regional head and various factors of regional income including own regional revenue (PAD), balance funds consisting of revenue sharing fund (DBH), general allocation fund (DAU) and special allocation funds (DAK) and surplus of budget calculation (SILPA) on the allocation of capital expenditure to district and city governments in Central Java Province in 2009-2016. This study uses panel data regression method. The type of data used in this study is secondary data obtained from the realization reports of district and city government budget in Central Java Province as outlined in the audit report (LHP) on the local government financial reports by the audit board of the Republic of Indonesia (BPK RI).

The results showed that simultaneously all financial variables had an effect on the dependent variable. But partially, only financial variables have a significantly effect on capital expenditure. However, the variable period of office of the regional head shows the opposite result compared to other variables.

Keywords: regional head, balancing fund, SILPA, capital expenditures.